

Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada Kurikulum di Indonesia

Sejarah perkembangan IPS dapat kita bagi ke dalam tiga fase:

1. Fase Diskursus

Istilah yang digunakan dalam bidang ini adalah *social studies* yang kemudian istilah tersebut juga digunakan menjadi nama sebuah lembaga yang bernama *Committee of Social Studies* (CSS) pada tahun 1913. Pada fase ini sekitar tahun 1935, terjadi diskursus para intelektual di Amerika Serikat terkait pertumbuhan dan tantangan agar *social studies* dapat menjadi suatu disiplin ilmu yang solid. Pada tahun 1940-1950, *National Council for The Social Studies* (NCSS) memunculkan sikap penekanan terhadap fakta-fakta sejarah dan budaya sebagai bagian hasil diskursus yang terjadi terhadap perlu tidaknya anak remaja bersikap demokratis dan kritis. Pada titik ini, ada dua diskursus tentang *social studies*, yaitu *citizenship education* atau *social studies education*. Diskursus ini terjadi dikarenakan adanya dua pihak yang mempunyai pandangan berbeda terhadap visi *social studies*.



Gambar 1.1 Logo NCSS

Pada rentang tahun 1940 sd 1960an, ada dua gerakan terhadap visi *social studies*, yang pertama adalah gerakan mengintegrasikan disiplin ilmu-ilmu sosial dan yang ke dua gerakan untuk bertahan pada masing-masing disiplin ilmu sosial. Sekitar tahun 1955 terobosan besar dilakukan oleh Maurice Hunt dan Lawrence Metcalf yang berusaha mengintegrasikan antara *citizenship education* dan *social studies education*, dengan membuka sudut pandang baru terhadap hal yang bersifat *closed area* atau istilah yang masih tabu di masyarakat menjadi *open area* dalam konteks refleksi rasional dalam upaya agar siswa dapat mengambil sikap dan keputusan terhadap permasalahan publik (*reflectif thinking & critical thinking*).

Pada tahun 1960an, muncul gerakan akademis yang memunculkan istilah *the new social studies*, diprakarsai oleh sejarawan dan ahli ilmu sosial dalam usaha mengembangkan kurikulum dan bahan ajar yang inovatif dan berskala besar, namun gerakan ini belum berhasil

sampai tahun 1970an, namun perlu ditekankan, gerakan ini berhasil meningkatkan *social studies* ke *higher level of intellectual pursuit* (Barr et al, 1977) yang melahirkan era pembelajaran *social science education*, walaupun secara substantif belum efektif dalam perubahan sikap siswa, dalam hal ini adalah sikap demokratis.

Pada era pembelajaran *social science education*, para ahli ilmu sosial dan sejarah banyak terpengaruh pemikiran Jerome Bruner yang mengatakan “*any subject can be taught effectively in some intellectually honest form to any child at any stage of development* (Barr et al, 1977 dalam Udin S. Winataputra, 2011), yang menyatakan bahwa setiap *subject* (materi) dapat diajarkan pada tingkat usia anak.

Pada akhirnya, mereka bersepakat untuk mengembangkan *social studies* dengan perspektif dari Jerome Bruner yang meyakini semua teori dapat diajarkan kepada semua tingkatan usia anak. Akan tetapi, pendapat Jerome Bruner dirasa sulit diterapkan di lapangan, walaupun mereka sudah bekerjasama dengan para pendidik dan ahli psikologi dalam mengembangkannya, akan tetapi pada akhirnya pendapat tersebut kembali memunculkan gerakan agar disiplin ilmu sosial diajarkan secara mandiri.

Kemudian konsorsium para ahli ilmu-ilmu sosial yang bernama *The Social Science Education Consortium*, menghasilkan dan menerbitkan sebuah buku berjudul *Concept and Structures in The New Social Studies Curriculum*. Mereka para ahli tersebut bersepakat tentang *the fundamental concepts and generalizations of a discipline, and the methods, procedures, and models necessary to develop and revise these fundamentals*”. Pendapat tersebut meyakini bahwa struktur disiplin akademis memiliki dua komponen yang menjadi rancangan bahan belajar *social studies* pada pembelajaran di sekolah, yaitu untuk menguasai konsep dan penggunaan metode inkuiri pada materi sejarah dan ilmu-ilmu sosial untuk menggeneralisasi pengetahuan (Barr, 1977, dalam Udin S. Winataputra, 2011).

Tahun 1994, para Dewan *National Council for The Social Studies*(NCSS) menerbitkan sebuah dokumen yang bernama *Expectations of Excellence: Curriculum Standar for the Social Studies*, yang kemudian menjadi dasar perkembangan *social studies* di USA khususnya sampai sekarang. Dalam dokumen tersebut, dinyatakan bahwa penekanan *social studies* pada tingkat Pendidikan terhadap keterpaduan *knowledge, skills, and attitudes within and across disciplines*, dan pada kelas rendah dibangun berdasarkan tema-tema tertentu.

2. Fase Interaksi

Program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I tahun 1969-1974 tim ahli dalam rumusan Pendidikan Nasional menemukan 5 problem:

- a. **Kuantitas.** Kuantitas yang berarti terkait dengan permasalahan perluasan dan pemerataan kesempatan semua warga untuk mendapatkan akses Pendidikan dan belajar;
- b. **Kualitas.** Kualitas yang berarti permasalahan pada mutu lulusan dan bagaimana meningkatkannya;
- c. **Relevansi.** Relevansi yang berarti adanya keselarasan antara sistem pada Pendidikan dengan kebutuhan pada pembangunan;
- d. **Efektifitas.** Efektifitas yang berarti bagaimana sistem pendidikan dan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana, agar kuantitas, kualitas, dan relevansi bisa berjalan dan tercapai;
- e. **Kaderisasi.** Pembinaan generasi muda dalam rangka menyiapkan tenaga produktif bagi kepentingan pembangunan nasional.

Selain itu, ramainya diskursus terhadap *social studies* yang terjadi di USA, berimbas kepada munculnya gerakan dan pemikiran para ahli Pendidikan di Indonesia tentang urgensi *social studies* pada kurikulum Pendidikan di Indonesia. Pada Seminar Nasional di Tawamangu tahun 1972, istilah IPS muncul pertama kali dan menjadi wacana yang menghasilkan beberapa istilah yaitu:

- a. Pengetahuan Sosial (*Social Science*)
- b. Studi Sosial (*Social Studies*)
- c. Ilmu Pengetahuan Sosial (*Social Science Education*)

3. Fase Perkembangan

Fase ini lebih menekankan penerapan mata pelajaran IPS di kurikulum Indonesia dari tahun ke tahun sampai dengan kurikulum 2013 sebagai *the new curriculum*. Pada tahun 1972-1973, IPS pertama kali diujicobakan pada Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PSSP) IKIP Bandung. Pada tahun 1975, IPS yang pada awalnya mencakup sejarah dan geografi dirasa tidak efektif dalam membentuk sikap kritis dan sosial siswa, sehingga perlu adanya reduksi mata pelajaran ilmu-ilmu sosial yang serumpun, dintegrasikan ke dalam mata pelajaran IPS sehingga menjadi terpadu. Pada kurikulum 1975 secara resmi dapat dikatakan sebagai kelahiran IPS pada kurikulum Indonesia. Pada kurikulum 1975 konsep Pendidikan IPS menampilkan 4 profil yaitu:

- a. Pendidikan IPS Khusus, yaitu Pendidikan Moral Pancasila (PMP) menggantikan mata pelajaran Kewargaan Negara.
- b. Pendidikan IPS terpadu untuk tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
- c. Pendidikan IPS untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMA) sebagai konfederasi Sejarah, Geografi, dan Ekonomi Koperasi.

- d. Pendidikan IPS untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diajarkan berdasarkan disiplin ilmu-ilmu sosial seperti Sejarah dan Geografi untuk Sekolah Pendidikan Guru (SPG), Ekonomi dan Sejarah untuk tingkat SMEA/SMK.

Pada kurikulum 1984 sampai dengan kurikulum 2013 IPS secara konseptual tetap pada penyederhanaan dari ilmu-ilmu sosial untuk tujuan paedagogis, dan pada kurikulum terbaru IPS hanya disajikan pada kelas 4-6 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah secara tematik terpadu.